



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



RENCANA KERJA

TAHUN
2026



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 ini.

RENJA ini masih mengacu pada RENSTRA Teknokratik 2025-2029 yang artinya nanti akan terdapat RENJA perubahannya ketika RENSTRA 2025-2029 secara definitive telah disahkan.

Rencana Kerja (RENJA) adalah proses perencanaan program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Teknokratik periode 2025-2029 serta hasil evaluasi dari evaluator. Setiap OPD dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja (PK) dan selanjutnya dilakukan pengukuran atas pencapaian kinerja. Hal ini dimaksudkan agar OPD yang bersangkutan dapat melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga sasaran 5 (lima) tahun kedepan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini setiap OPD dapat diukur keberhasilan atau kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan OPD dalam melaksanakan kinerjanya sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Kerja (Renja) ini akan disajikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sebelumnya, analisis kinerja, review terhadap rancangan awal RKPD, usulan dari masyarakat dan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah yang akan dicapai pada tahun bersangkutan dan target perkiraan maju pada tahun berikutnya. Kami berharap dengan adanya



Rencana Kerja (Renja) ini Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan saran serta perbaikan dari atasan dan lembaga pengawasan untuk penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 ini.

Putussibau, 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
BAB II 6	
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH	6
TAHUN LALU.....	6
BAB III 37	
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	37
BAB IV 46	
PENUTUP.....	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD	7
Tabel 2 Capaian SAKIP Sekretariat Daerah	12
Tabel 3 Matrik RATL LHE AKIP 2023	12
Tabel 4 Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil Monev Kinerja Internal Triwulan IV 2024	15
Tabel 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	18
Tabel 6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	40
Tabel 8 Program dan Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja	41



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah.....	48
--	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja yang disusun akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan Tupoksinya. Penyusunan Renja ini



nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh OPD memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen lainnya. Penyusunan Renja ini mengacu kepada hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebelumnya sehingga yang menjadi masalah pada Renja sebelumnya tidak terjadi kembali pada Renja yang akan datang.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah menjadi bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD yang disusun akan dijadikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya akan disusun menjadi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). APBD inilah yang nantinya akan menjadi panduan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.

Selanjutnya setelah dokumen Anggaran telah ditetapkan akan dibuat Perjanjian Kinerja yang selanjutnya akan diukur dan hasil capaian kinerja akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dilakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor **XX** Tahun **XXXX** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun **2025-2029**; (Ranwal RPJMD)
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22/SETDA/PERKEU/2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen sekaligus rujukan utama sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan dan



Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025. Penyusunan RAPBD dilaksanakan secara partisipatif melalui rangkaian program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan daerah, terutama demi terlaksananya pembangunan secara menyeluruh dan merata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, melalui perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, bertahap, efektif, aspiratif, partisipatif serta berkesinambungan seiring terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejalan dengan fungsi dan cakupan pokok dokumen Rencana Kerja (Renja) yang pada hakekatnya merupakan komitmen Sekretariat Daerah serta memuat seluruh kebijakan dan arah kebijakan pembangunan dalam masa satu tahunan, maka secara garis besar, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
3. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/Kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
4. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah.
5. Sebagai patokan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja serta Evaluasi Kinerja.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat menggambarkan dan menguraikan secara sistematis arah kebijakan prioritas pembangunan dan wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan, maka materi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud Dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini akan dipaparkan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD; Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada Bab ini akan dipaparkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan sasaran Renja OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada Bab ini akan dipaparkan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam bentuk program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembuatan Renja Sekretariat Daerah.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Teknokratik Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan target kinerja pada Perjanjian Kinerja terhadap realisasi kinerja pada Lkjp Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan Target Akhir Renstra, Target 2025 serta prakiraan capaian tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan kendala yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Teknokratik Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, seperti pada tabel berikut ini:



Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra Teknokratik 2029	Realisasi 2023	Target dan Realisasi 2024 (N-2)			2025 (N-1)		Perkiraan Realisasi 2025 (n-1)		Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	
4.01	IKU	Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Sasaran Renstra Baru (2025-2029)
		Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	B	BB	B	86,29	BB	Nilai	BB	100,00	
		Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	89	83,84	80,8	88	108,64	80,9	Nilai	80,9	100,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	-	100	92	91,89	100	%	100	100,00	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	-	95	100	105,26	95	%	95	100,00	-
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	90	-	90	99	110,39	90	%	90	100,00	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra Teknokratik 2029	Realisasi 2023	Target dan Realisasi 2024 (N-2)			2025 (N-1)		Perkiraan Realisasi 2025 (n-1)		Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	
	Urusan Pemerintah Daerah											
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengendalian Penataan Struktur Perangkat Daerah	75	-	-	-	-	3	PD	3	100,00	Indikator Baru
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menetapkan Analisis Jabatan	30	-	-	-	-	3	Anjab	3	100,00	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	35	-	7	7	100,00	27	PD	27	100,00	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	30	-	6	6	100,00	6	PD	6	100,00	-
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	90	-	18	20	111,11	20	PD	20	100,00	-
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	1070	-	200	196	98,00	200	Lyn	200	100,00	-
		Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	1210	-	230	226	98,26	230	Lyn	230	100,00	-
		Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	1055	-	200	196	98,00	200	Lyn	200	100,00	-
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	-	100	104	103,64	100	%	100	100,00	-
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	59,8	-	62	54	86,44	65	%	65	100,00	-



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra Teknokratik 2029	Realisasi 2023	Target dan Realisasi 2024 (N-2)			2025 (N-1)		Perkiraan Realisasi 2025 (n-1)		Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	
		Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan	87,6	-	74	87	117,51	78	%	78	100,00	-
		Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100	-	90	100	111,11	100	%	100	100,00	-
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	95	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	95	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	95	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kebijakan yang harmonis	71,6	-	70	67	96,15	67	%	67	100,00	-
		Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	91	-	90	82	91,25	82	%	82	100,00	-
		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	91	-	90	87	96,30	77	%	77	100,00	-
		Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	91	-	90	50	55,56	86	%	86	100,00	-
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	94,2	-	90	91	101,45	90	%	90	100,00	-
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
		Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
		Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna dan tepat sasaran	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
		Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan	80	-	80	100	125,00	80	%	80	100,00	-



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra Teknokratik 2029	Realisasi 2023	Target dan Realisasi 2024 (N-2)			2025 (N-1)		Perkiraan Realisasi 2025 (n-1)		Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	
		metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing										
		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	250	-	50	50	100,00	50	OPD	50	100,00	-
		Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	100	-	20	20	100,00	20	Plk Ush	20	100,00	-
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	-	100	100	100,00	100	%	100	100,00	-

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH-2026>

Sebelum melanjutkan pembahasan evaluasi, disini perlu diketahui bahwa Renja ini sudah menggunakan RENSTRA terbaru yaitu Rentsra Teknokratik Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 sehingga apabila terdapat perbedaan signifikan dari hasil analisis disebabkan perbedaan indikator dan sasaran pada Renstra baru tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 pada Tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :



1.1.1. Sasaran Renstra baru 2025-2029

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kapuas Hulu maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Renstra baru yang masih mengacu kepada Ranwal RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan Renja tahun 2025 masih mengacu pada Renstra 2021-2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada Renstra lama indikator kinerja utama (IKU) hanya terdapat tiga sasaran saja yaitu terkait SAKIP, LPPD dan IKM. Sedangkan pada Renstra yang terbaru ini terdapat 6 sasaran dan 6 indikatornya dengan 2 indikator lama masih tetap digunakan dan 1 indikator terkait LPPD sudah tidak digunakan lagi.

Alasan tidak menggunakan indikator LPPD tersebut karena karena trend penilaiannya tidak setiap tahun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri sehingga apabila tetap menggunakan indikator tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan rendahnya capaian terkait indikator tersebut. Penilaian terhadap LPPD terakhir dikeluarkan pada tahun 2022 dengan nilai 2,671.

Berdasarkan hasil evaluasi internal pada triwulan IV tahun 2024 yang dilaksanakan pada 4 Februari 2025 salah satu yang menjadi bahan evaluasi yaitu sasaran strategis pada IKU yang lama tidak mencakup beberapa asisten dibawahnya atau beberapa program tertentu dibawahnya. Secara tersistem seharusnya IKU merupakan indikator yang selanjutnya akan dijabarkan melalui indikator dibawahnya seperti indikator asisten dan kepala bagian. Namun ketiga indikator pada IKU lama tidak mengakomodir pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pada Renstra terbaru tersebut diupayakan agar keterkaitan indikator diatas dan dibawahnya harus memiliki ketergantungan, serta keselarasan IKU pada target dan tujuan pada RPJMD 2025-2029.

1.1.2. Indikator Predikat SAKIP Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu bahwa SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2022



mendapat predikat CC dan secara bertahap semakin meningkat pada Tahun 2023 telah mencapai predikat B dengan Nilai 59,8. Pada Tahun 2023 ditargetkan dengan Nilai BB dan terealisasi dengan Nilai B dengan capaian sebesar 87,50%. Adapun rincian penilaian seperti pada tabel:

Tabel 2 Capaian SAKIP Sekretariat Daerah

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	18,0
2	Pengukuran Kinerja	30	16,2
3	Pelaporan Kinerja	15	10,1
4	Evaluasi Kauntabilitas Kinerja	25	15,5
TOTAL		100%	59,8

Sumber: <https://bit.ly/LHE-AKIP-2023>

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam kategori predikat B yang artinya telah terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Rekomendasi dan Rencana Aksi Tindaklanjuti:

Tabel 3 Matrik RATL LHE AKIP 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	2	3
1	melengkapi dokumen perencanaan dengan dokumen rencana aksi yang menjabarkan Renja dan Perjanjian Kinerja menjadi serangkaian tahapan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja	Membuat Renaksi Kinerja
2	Mempublikasikan dokumen renja sebelum akhir triwulan I tahun berkenaan	Membuat dan mempublikasikan renja sebelum triwulan III
3	Memastikan kembali agar setiap pejabat yang menandatangani Perjanjian Kinerja menyusun SKP yang selaras dengan Perjanjian Kinerjanya dan setiap pegawai menyusun SKP yang selaras dengan SKP atasannya.	Memastikan setiap SKP agar selaras dengan Perjanjian Kinerja
4	Memastikan kembali agar setiap indikator kinerja individu (IKI) yang digunakan dilengkapi dengan	Pembuatan dokumen IKI akan mencantumkan



No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	definisi operasional dan mekanisme pengumpulan data (penentuan sumber data kinerja) yang jelas	sumber data berupa bukti dukung yang jelas
5	Menyelenggarakan pengukuran kinerja setiap triwulan secara rutin dengan menggunakan data kinerja yang relevan	<p>Melakukan pengukuran kinerja setiap 3 bulan berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan mengumpulkan data kinerja langsung ke setiap Bagian-Bagian beserta bukti dukung yang relevan</p> <p>Melakukan rapat evaluasi berdasarkan pencapaian pada pengukuran kinerja</p>
6	Memperbaiki penyajian laporan kinerja perangkat daerah periode selanjutnya dengan menyertakan informasi tentang namun tidak terbatas pada :	Laporan Kinerja akan memuat:
	- aksi-aksi konkret yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui berikut hasilnya:	- Analisis Strategi dalam menangani permasalahan serta strategi perbaikan dalam mengatasi kendala
	- memberikan penjelasan/penafsiran/interpretasi atas nilai efisiensi yang diperoleh	<p>- memberikan informasi atas upaya perbaikan masalah yang terdapat pada LAKIP sebelumnya</p> <p>- akan membahas perolehan terkait perolehan nilai efisiensi</p>
7	Melaksanakan penilaian mandiri akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Membuat form penilaian mandiri AKIP
8	Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi serta melaksanakan rencana tersebut	RATL ini

Sumber: <https://bit.ly/RATL-AKIP-INKAB>



1.1.3. Tidak terdapat data Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pada Tahun 2023 tidak terdapat data realisasi kinerja seperti terlihat pada tabel 1 diatas. Pada Tahun 2023 realisasi yang ada hanya pada 2 indikator saja yaitu Predikat SAKIP Sekretariat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2023 tidak melakukan pengukuran IKI atas kinerja yang telah diperjanjikan. Pengukuran kinerja didasarkan atas serapan anggaran sehingga tidak memiliki sumber data atau data dukung yang diharapkan oleh evaluator. Pengukuran Kinerja seharusnya dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja sebagaimana yang telah dijabarkan dalam IKI sehingga nilai yang ada pada dokumen pengukuran berdasarkan bukti dukung dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

1.1.4. Rendahnya capaian indikator Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Publikasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan ditargetkan sebesar 90% dengan target jumlah kegiatan yang dipublikasikan sebesar 36 kegiatan. Dengan target tersebut telah terealisasi kegiatan publikasi dan penyebarluasan sebanyak 20 kegiatan saja dengan capaian kinerja hanya mencapai 55,56% saja. Hal ini disebabkan karena tidak keseuaian antara target dan realisasi kinerja sementara yang dilakukan penyebarluasan hanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati saja. Sehingga dirasa perlu melakukan penyesuaian terhadap target kinerja serta formulasi perhitungan dengan hanya pada perhitungan perda dan perbup saja.

1.1.5. Rendahnya Capaian Indikator Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Dapat dilihat pada tabel 1 diatas maka yang menjadi permasalahan diuraikan sebagai berikut:

- Tim batas Desa dan Camat sulit membangun kesepakatan Batas Desa, hingga proses pentapan dan penegasan batas desa.



- Masih terdapat pemahaman masyarakat yang keliru terkait batas desa dapat menghilangkan hak kepemilikan tanah masyarakat desa dan perbedaan kepentingan, baik kepentingan, baik kepentingan sosial dan ekonomi.
- Tim batas Desa dan Camat sulit membangun Kesepakatan Batas Desa, Sehingga proses penetapan dan penegasan batas desa masih terdapat pemahaman masyarakat yang keliru terkait batas desa dapat menghilangkan hak kepemilikan tanah masyarakat desa dan perbedaan kepentingan, baik kepentingan sosial dan ekonomi.

1.1.6. Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi 2024

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada 4 Februari 2024 maka diuraikan rencana aksi tindaklanjut sebagai berikut:

Tabel 4 Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil Monev Kinerja Internal
Triwulan IV 2024

No	Strategi terhadap Masalah	Target waktu selesai	Penanggung Jawab	Bukti Dukung	Status/ Progres	Keterangan
1	Melakukan penilaian Mandiri AKIP	maret 2025	Perkeu	Link	Selesai	
2	Berdiskusi dengan Inkab dan Bagian Organisasi	Sepanjang waktu	Perkeu		Dalam Proses	
3	Melakukan perbaikan terhadap Pohon Kinerja dan Cascading kinerja	April 2025	Perkeu	Link Link	Dalam Proses	
4	Buat surat 1 bulan sebelum pelaksanaan (Tr 1 buat Februari, Tr2 Mei, tr 3 Agustus, tr 4 November). Surat pengumpulan data kinerja juga dibuat sama seperti diatas. Batas pengumpulan data tr 1 14 April, tr 2 14 Juli, tr 3 14 Oktober, tr 4 14 Januari	April 2025	Perkeu	Link	Dalam Proses	
5	Belajar secara mandiri dari internet	Sepanjang waktu	Tim SAKIP	-	Dalam Proses	
6	Jemput Bola data pada Bagian	Sepanjang waktu	Perkeu	-	Dalam Proses	
7	Kumpulkan semua SKP	Setiap Triwulan	Umum	-	Dalam Proses	
8	Updating mengenai aturan terbaru	Sepanjang waktu	Tim SAKIP	-	Dalam Proses	
9	Mempelajari secara mendalam terkait aturan baru	Sepanjang waktu	Tim SAKIP	-	Dalam Proses	



No	Strategi terhadap Masalah	Target waktu selesai	Penanggung Jawab	Bukti Dukung	Status/ Progres	Keterangan
10	Berdiskusi dengan seluruh tim tentang aturan terbaru	Sepanjang waktu	Tim SAKIP	-	Dalam Proses	
11	Beradaptasi cepat mengikuti teknologi	Sepanjang waktu	Tim SAKIP	-	Dalam Proses	
12	Menyusun jadwal pengukuran kinerja dan Monev Kinerja	April 2025	Perkeu	Link	Dalam Proses	
13	Mengikuti Bimtek/ Diklat SAKIP	Februari 2025	Perkeu	-	Tidak Selesai	
14	Menggunakan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja	April 2025	Perkeu	Link	Selesai	
15	Melakukan perubahan target kinerja pada Renstra baru terkait LPPD	maret 2025	Perkeu	Link	Selesai	Merubah Indikator

Sumber: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bGKzftOLW69TNYvq-8NJ1OGg5xDavFYULTYR5px1oo0/edit?gid=0#gid=0>

Berdasarkan dari seluruh permasalahan yang telah diapaparkan diatas permasalahan diatas maka diuraikan secara umum penyebab dan Solusi untuk pemecahan masalahnya:

1. Rendahnya kemampuan SDM dalam menyusun SAKIP. SDM yang menyusun SAKIP belum berpengalaman serta belum pernah mengikuti Diklat dan Bimtek mengenai Perencanaan. Saran mengenai permasalahan ini agar mempersiapkan anggaran untuk Diklat dan Bimtek.
2. Minimnya jumlah SDM yang menyusun Dokumen SAKIP. Pada Tahun 2021 SDM yang menangani Perencanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu hanya terdiri dari 2 (dua) orang. Minimnya SDM dalam perencanaan dengan kompleksitas pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien dan menyebabkan nilai SAKIP rendah. Saran mengenai permasalahan ini yaitu pada tahun 2023 menambah SDM 1 (satu) orang dan pada tahun 2024 menambah 2 (dua) orang Perencana sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Tingginya mobilitas dan tanggung jawab yang luas cakupannya pada Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah memiliki 3 Asisten dan 9 Bagian yang berarti begitu besar dan kompleksnya tugas dan pekerjaan pada Sekretariat Daerah. Dapat dikatakan bahwa dalam 1



bagian hampir setara dengan 1 OPD dan beberapa Bagian merupakan pembina pada setiap OPD.

4. Terkait rendahnya nilai SAKIP maka akan dilakukan peningkatan nilai dengan cara melakukan penilaian mandiri terhadap AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun hasil penilaian mandiri tersebut dapat dilihat pada link: <https://bit.ly/Penilaian-Mandiri-AKIP-Setda-KH>
5. Akan melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dari Indikator Kinerja Utama sampai dengan level staf dan akan melakukan evaluasi terhadap pencapaiannya setiap triwulan pula.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Teknokratik Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Teknokratik SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	Tahun N-3 (2023)	Tahun N-2 (2024)		Tahun N-1 (2025)	Tahun N (2026)	
										Realisasi	%			
Sasaran 1	Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	-	95	96	97	98	100	-	-	-	-	96	Indikator Baru
Sasaran 2	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	
Sasaran 3	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	B	B	B	BB	BB	B	B	86,29	BB	B	-
Sasaran 4	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	-	80	90	95	100	100	-	-	-	-	90	Indikator Baru
Sasaran 5	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	
Sasaran 6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	-	-	80	80	80	80	80	83,84	88	108,6	80,9	80	-
4.01.01	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4.01.01.2.01	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	-	-	100	100	100	100	100	-	92	91,89	100	100	-



Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Teknokratik SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	Tahun N-3 (2023)	Tahun N-2 (2024)		Tahun N-1 (2025)	Tahun N (2026)	
										Realisasi	%			
4.01.01.2.02	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4.01.01.2.03	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	-	-	95	95	95	95	95	-	100	105,3	95	95	-
4.01.01.2.05	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	-	-	90	90	90	90	90	-	99	110,4	90	90	-
4.01.01.2.06	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4.01.01.2.07	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4.01.01.2.08	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4.01.01.2.09	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4.01.01.2.11	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4.01.01.2.13	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengendalian Penataan Struktur Perangkat Daerah	-	-	15	15	15	15	15	-	-	-	3	15	Indikator Baru
	Jumlah Perangkat Daerah yang Menetapkan Analisis Jabatan	-	-	6	6	6	6	6	-	-	-	3	6	
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	-	-	7	7	7	7	7	-	7	100	27	7	-
	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	-	-	6	6	6	6	6	-	6	100	6	6	-
	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	-	-	18	18	18	18	18	-	20	111,1	20	18	-
4.01.01.2.14	Jumlah layanan Fasilitas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	-	-	200	210	215	220	225	-	196	98	200	210	-
	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	-	-	230	240	245	245	250	-	226	98,26	230	240	-
	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	-	-	200	210	215	215	215	-	196	98	200	210	-
4.01.02	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	104	103,6	100	100	-



Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Teknokratik SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	Tahun N-3 (2023)	Tahun N-2 (2024)		Tahun N-1 (2025)	Tahun N (2026)	
										Realisasi	%			
4.01.02.2.01	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	-	-	55	57	60	62	65	-	54	86,44	65	57	-
	Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan	-	-	87	87	88	88	88	-	87	117,5	78	87	-
	Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	-	-	100	100	100	100	100	-	100	111,1	100	100	-
4.01.02.2.02	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	-	-	95	95	95	95	95	-	100	100	100	95	-
	Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	-	-	95	95	95	95	95	-	100	100	100	95	-
	Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	-	-	95	95	95	95	95	-	100	100	100	95	-
4.01.02.2.03	Persentase kebijakan yang harmonis	-	-	65	68	70	75	80	-	67	96,15	67	68	-
	Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	-	-	90	90	90	90	95	-	82	91,25	82	90	-
	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	90	90	90	90	95	-	87	96,3	77	90	-
	Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	-	-	90	90	90	90	95	-	50	55,56	86	90	-
4.01.02.2.04	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	-	-	96	97	98	90	90	-	91	101,5	90	97	-
4.01.03	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	100	-	100	100	-
	Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna dan tepat sasaran	-	-	100	100	100	100	100	-	100	-	100	100	-
	Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4.01.03.2.01	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4.01.03.2.02	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4.01.03.2.03	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	-	-	80	80	80	80	80	-	100	125	80	80	-



Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Teknokratik SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				2025	2026	2027	2028	2029	Tahun N-3 (2023)	Tahun N-2 (2024)		Tahun N-1 (2025)		Tahun N (2026)
										Realisasi	%			
	Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	-	-	50	50	50	50	50	-	50	100	50	50	-
	Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	-	-	20	20	20	20	20	-	20	100	20	20	-
4.01.03.2.04	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH-2026>

Berdasarkan tabel diatas ditandai dengan warna kuning telah dijelaskan dan diuraikan sebelumnya pada halaman **14**.



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Administrasi Umum, Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian Dan Pembangunan dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan wakil pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah secara teknis membantu kelancaran tugas Pimpinan dan wakil pimpinan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan wakil pimpinan, tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Adapun Isu strategis yang di hadapi:

1. Antisipasi pengaruh media sosial pada kehidupan Masyarakat Kapuas Hulu.
2. Peningkatan upaya Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pengembangan komoditas unggulan daerah.
3. Peningkatan pengawasan eksploitasi sumber daya tak terbarukan serta pengelolaan dan mitigasi bencana banjir.
4. Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi berbasis inovasi dan digitalisasi.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Setiap program dan kegiatan pada tahun 2026 di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah dibuat dalam bentuk rancangan awal yang tertuang di dalam RANWAL RENJA. Rancangan awal ini telah disusun pada awal Bulan Januari 2025 yang terdapat pada SIPD dan akan menjadi patokan dalam menyusun Renja 2026 serta untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA dan selanjutnya akan disahkan menjadi DPA dan akan dibuat Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tahunan.

Dalam Renja tahun 2026 ini akan dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan untuk menilai apakah Renja awal yang disusun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mencegah adanya program atau kegiatan yang tidak diakomodir. Reviu didasarkan atas pengukuran dan evaluasi kinerja pada Tahun 2024 serta LHE AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	A	80.724.628.105	Sasaran 3	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	B	-	-
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	3		Sasaran 5	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95		-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	80,9		Sasaran 6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	85		-
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	61.638.942.133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	44.951.774.416	-
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	1.014.807.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	790.575.758	-
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	352.782.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	524.664.495	-
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	58.622.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	42.948.678	-
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	53.571.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	32.443.965	-
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	52.319.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	32.620.080	-
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan	2	52.964.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan	2	17.848.310	-



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
		Dokumen Perubahan DPA SKPD				Dokumen Perubahan DPA SKPD			
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ki nerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	105.852.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ki nerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	109.886.805	-
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	338.697.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	30.163.425	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	35.609.453.639	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	13.697.020.414	-
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	33.914.048.639	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	12.390.249.104	-
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	195.776.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	208.167.930	-
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	825.168.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	792.736.400	-
4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	56.754.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	30.181.335	-
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	57.311.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	45.299.365	-
4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindakanjutan pemeriksaan	1	447.138.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindakanjutan pemeriksaan	1	190.884.780	-
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	59.388.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	32.697.690	-
4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	53.870.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	6.803.810	-



Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	387.798.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	409.807.250	-
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	24.458.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	32.660.000	-
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	29.218.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	40.841.000	-
4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	45.717.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	51.804.000	-
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	27.483.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	36.525.000	-
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	260.922.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	247.977.250	-
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	90	2.223.926.699	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	90	3.655.281.000	-
4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	89.479.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	103.500.000	-
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	232.680.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	135.000.000	-
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	1.618.655.699	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	3.161.250.000	-
4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Siste	12	100.832.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Siste	12	30.788.000	-
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	12	17.150.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	12	15.000.000	-
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	165.130.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	209.743.000	-



Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	4.216.656.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	10.239.855.600	-
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	88.212.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	145.000.000	-
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	39.750.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	284.400.000	-
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	386.953.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	566.953.000	-
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	199.681.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	215.000.000	-
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	179.279.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	204.651.600	-
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	1.117.944.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	2.117.944.000	-
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	2.033.146.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	6.533.152.000	-
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	171.690.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	172.755.000	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	3.887.532.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	551.400.000	-
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	3.851.832.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	520.000.000	-
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	35.700.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	31.400.000	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	3.826.502.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	3.822.937.175	-
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	61.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	61.000.000	-
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.161.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.161.000.000	-



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	925.565.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	920.937.175	-
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	678.937.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	680.000.000	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	1.728.940.345	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	2.518.273.750	-
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	566.789.345	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	1.299.975.000	-
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	686.901.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	693.048.750	-
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	475.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	525.250.000	-
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100	726.831.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100	726.831.000	-
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	207.831.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	207.831.000	-
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	119.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	119.000.000	-
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	400.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	400.000.000	-
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengendalian Penataan Struktur Perangkat Daerah	3	565.026.100	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengendalian Penataan Struktur Perangkat Daerah	3	746.276.865	-



Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan Penataan Analisis Jabatan	3			Jumlah Perangkat Daerah yang Menetapkan Analisis Jabatan	3		-
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	27			Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	10		-
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6			Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	8		-
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	20			Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	23		-
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi Struktur Organisasi	3	180.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi Struktur Organisasi	22	234.904.575	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Analisis Jabatan	3			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Analisis Jabatan	5		-
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	27	180.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	27	237.249.790	-
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	27			Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	10		-
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	205.026.100	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	274.122.500	-
		Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	6			Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	8		-
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	7.451.469.100	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	7.793.515.605	-
		Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	230			Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	230		-
		Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200			Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200		-
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	3.469.529.600	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	3.457.375.255	-



Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	961.350.500	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	918.498.430	-
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	3.020.589.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	3.417.641.920	-
-	-	-	-	-	Sasaran 1	Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	96	-	-
-	-	-	-	-	Sasaran 4	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	90	-	-
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	16.840.484.922	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	51.279.649.463	-
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	65	693.179.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	61	617.829.231	-
		Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan	78			Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan	78		-
		Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100			Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100		-
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	202.393.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	160.384.050	-
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	138.997.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	146.411.663	-
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	351.789.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	311.033.518	-
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial	100	15.371.271.822	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial	95	49.637.643.748	-



Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
		yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan				yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan			
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100			Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	95		-
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	100			Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	95		-
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6	14.746.338.022	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6	48.864.554.320	-
KODE AKUN KEGIATAN SALAH !	KODE AKUN KEGIATAN SALAH !	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	KODE AKUN KEGIATAN SALAH !	KODE AKUN KEGIATAN SALAH !	KODE AKUN KEGIATAN SALAH !	KODE AKUN KEGIATAN SALAH !	KODE AKUN KEGIATAN SALAH !	KODE AKUN KEGIATAN SALAH !	-
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Kebijakan dari Evaluasi, dan Capaian Kinerja Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	2	289.527.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Kebijakan dari Evaluasi, dan Capaian Kinerja Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	2	288.313.489	-
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kebijakan yang harmonis	67	562.306.100	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kebijakan yang harmonis	68	869.735.570	-
		Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	82			Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	90		-
		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	77			Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	90		-



Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
		Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	86			Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	90		-
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550	277.021.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550	423.602.843	-
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	13	150.210.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	13	288.899.245	-
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70	135.075.100	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70	157.233.482	-
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	90	213.728.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	90	154.440.915	-
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4,5	213.728.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	154.440.915	-
-	-		-	-	Sasaran 2	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	-	-
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	2.245.201.050	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	3.369.966.396	-
		Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100			Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100		-
		Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna	100			Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna dan tepat sasaran	100		-
		Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100			Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100		-
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	327.766.800	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	475.361.250	-
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	4	118.982.200	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	4	194.547.375	-



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
	Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	52.391.300	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	104.574.500	-
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	52.131.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	49.750.000	-
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	52.131.300	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	49.750.000	-
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	52.131.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	76.739.375	-
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	139.511.600	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	219.099.000	-
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	41.676.500	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	39.800.000	-
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	47.081.700	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	76.615.000	-
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	50.753.400	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	102.684.000	-
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	80	1.625.796.350	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	80	2.530.280.921	-
		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	50			Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	50		-
		Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan	20			Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan	20		-



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
		personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)				personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)			
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	525	1.021.069.150	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	525	1.456.721.591	-
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	78	377.389.100	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	70	494.051.430	-
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	227.338.100	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	579.507.900	-
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	152.126.300	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	145.225.225	-
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	52.131.300	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	49.750.000	-
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	52.131.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	49.750.000	-
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	47.864.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	45.725.225	-

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH-2026>

Keterangan Warna: Menjadi Bahan Evaluasi atau mengalami perbaikan



Berdasarkan dari tabel tersebut diatas maka diuraikan sebagai berikut:

- Terdapat beberapa target yang kosong pada tabel Rancangan Awal: seluruh item yang kosong merupakan sasaran strategis yang baru berdasarkan Renstra 2025-2029 yang merupakan IKU kepala OPD
- Target Nilai SAKIP semula ditargetkan menjadi A namun berdasarkan hasil diskusi serta melihat hasil realisasi 3 tahun kebelakang dengan realisasi rata-rata B maka pada tahun 2026 ditargetkan mendapat nilai B dengan tetap optimis pada akhir periode renstra mendapat nilai BB
- Indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten dilakukan perubahan. Hal ini disebabkan bahwa tren penilaian 3 tahun sebelumnya tidak pernah dikeluarkan nilai LPPD Kabupaten sehingga Indikator diubah menjadi: Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan
- Target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah semula ditargetkan 80,9 diubah menjadi 85,0 hal ini dengan melihat hasil penilaian 3 tahun terakhir yang memperoleh nilai 83,8 dan 87,8
- Pada Bagian Organisasi terdapat perubahan satu indikator dan beberapa target, hal ini disebabkan perubahan nomenklatur yang semula melakukan pendampingan menjadi fasilitator dalam penerapan SAKIP, RB, ANJAB dan ketatalaksanaan serta target yang diubah dengan melihat kebutuhan organisasi yang masih memerlukan pembinaan
- Indikator Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa mengalami perubahan target, hal ini disebabkan Tim batas Desa dan Camat sulit membangun kesepakatan Batas Desa, hingga proses pentapan dan penegasan batas desa. Masih terdapat pemahaman masyarakat yang keliru terkait batas desa dapat menghilangkan hak kepemilikan tanah masyarakat desa dan perbedaan kepentingan, baik kepentingan, baik kepentingan sosial dan ekonomi. Tim batas Desa dan Camat sulit membangun Kesepakatan Batas Desa, Sehingga proses penetapan dan penegasan batas desa masih terdapat



pemahaman masyarakat yang keliru terkait batas desa dapat menghilangkan hak kepemilikan tanah masyarakat desa dan perbedaan kepentingan, baik kepentingan sosial dan ekonomi

- Indikator Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan target, hal ini disebabkan karena tidak kesesuaian antara target dan realisasi kinerja sementara yang dilakukan penyebarluasan hanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati saja. Sehingga target ini terlalu besar dan perlu melakukan penyesuaian terhadap target kinerja



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN". yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang pertama yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi "BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045".

3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **"Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)**. Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. **Semakin Harmonis:** Mengedepankan nilai etika, moral, dan norma dalam masyarakat



2. **Semakin Energik:** meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Kesehatan, Pembangunan keolahragaan, dan pendapatan per kapita
3. **Semakin Berdaya saing:** mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih baik, didukung SDM yang unggul.
4. **Semakin Amanah:** mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN
5. **Semakin Terampil:** Meningkatkan kualitas SDM yang handal, kreatif, inovatif, dan produktif

Dalam rangka mewujudkan **Visi** tersebut maka telah ditetapkan berbagai **Misi** Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.



Adapun tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondusivitas wilayah dengan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata dengan indikator PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
3. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Predikat SAKIP
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan 6 (enam) sasaran sebagai berikut:

Sasaran Pertama :

“Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat” dengan indikator sasaran adalah: Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan

Sasaran Kedua :

“Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Perekonomian dan SDA”, dengan indikator sasaran adalah: Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan

Sasaran Ketiga :

“Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah”, dengan indikator sasaran adalah: Predikat SAKIP Sekretariat Daerah

Sasaran Keempat :

“Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan”, dengan indikator sasaran adalah: Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan



Sasaran Kelima :

“Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum”, dengan indikator sasaran adalah: Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan

Sasaran Keenam :

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah”, dengan indikator sasaran adalah: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah

Adapun Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2026 sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
				2026
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	96%
2	Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100%
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	B
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	90%
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95%
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	85



3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 3 program dan 19 Kegiatan dengan 78 Sub Kegiatan.

Tabel 8 Program dan Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025	Satuan	2026		2027		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	
Sekretariat Daerah											
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah			Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	Nilai	B	44.951.774.416	B	45.850.809.905	SEKDA
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum			Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	%	95		95		SEKDA
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah			80,9	Nilai	85		85		SEKDA
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	%	100	44.951.774.416	100	45.850.809.905	ASISTEN ADUM
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	%	100	790.575.758	100	806.387.273	PERKEU
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	4	524.664.495	4	535.157.785	PERKEU
		4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok	1	42.948.678	1	43.807.651	PERKEU
		4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dok	1	32.443.965	1	33.092.844	PERKEU
		4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	1	32.620.080	1	33.272.482	PERKEU
		4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2	Dok	2	17.848.310	2	18.205.276	PERKEU
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ki nerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Lap	5	109.886.805	5	112.084.541	PERKEU
		4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	Lap	4	30.163.425	4	30.766.694	PERKEU
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%	100	13.697.020.414	100	13.970.960.822	PERKEU
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	12	12.390.249.104	12	12.638.054.086	PERKEU
		4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dok	1	208.167.930	1	212.331.289	PERKEU
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Dok	1	792.736.400	1	808.591.128	PERKEU
		4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	1	30.181.335	1	30.784.962	PERKEU
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	45.299.365	1	46.205.352	PERKEU	



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025	Satuan	2026		2027		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	
		4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1	Dok	1	190.884.780	1	194.702.476	PERKEU
		4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Lap	4	32.697.690	4	33.351.644	PERKEU
		4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	1	6.803.810	1	6.939.886	PERKEU
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	%	95	409.807.250	95	418.003.395	UMUM
		4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	32.660.000	1	33.313.200	UMUM
		4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	40.841.000	1	41.657.820	UMUM
		4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1	51.804.000	1	52.840.080	UMUM
		4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	36.525.000	1	37.255.500	UMUM
		4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	247.977.250	1	252.936.795	UMUM
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	90	%	90	3.655.281.000	90	3.728.386.620	UMUM
		4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Unit	12	103.500.000	12	105.570.000	UMUM
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	135.000.000	1	137.700.000	UMUM
		4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	Dok	12	3.161.250.000	12	3.224.475.000	UMUM
		4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Siste	12	Dok	12	30.788.000	12	31.403.760	UMUM
		4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	12	Dok	12	15.000.000	12	15.300.000	UMUM
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	Orang	18	209.743.000	18	213.937.860	UMUM
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	%	100	10.239.855.600	100	10.444.652.712	UMUM
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	145.000.000	1	147.900.000	UMUM
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	Paket	1	284.400.000	1	290.088.000	UMUM
		4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	566.953.000	1	578.292.060	UMUM
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	215.000.000	1	219.300.000	UMUM
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	204.651.600	1	208.744.632	UMUM
		4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Laporan	30	2.117.944.000	30	2.160.302.880	UMUM
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1500	Laporan	1500	6.533.152.000	1500	6.663.815.040	UMUM
		4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	1	172.755.000	1	176.210.100	UMUM
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	%	100	551.400.000	100	562.428.000	UMUM
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	520.000.000	1	530.400.000	UMUM
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	650	31.400.000	650	32.028.000	UMUM
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	100	3.822.937.175	100	3.899.395.919	UMUM
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	Lap	5053	61.000.000	5053	62.220.000	UMUM
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	2.161.000.000	12	2.204.220.000	UMUM
		4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	6	920.937.175	6	939.355.919	UMUM
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	680.000.000	12	693.600.000	UMUM
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	100	2.518.273.750	100	2.568.639.225	UMUM
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34	Unit	34	1.299.975.000	34	1.325.974.500	UMUM



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025	Satuan	2026		2027		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan kondusivitas wilayah			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	11	693.048.750	11	706.909.725	UMUM
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	525.250.000	2	535.755.000	UMUM
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100	%	100	726.831.000	100	741.367.620	UMUM
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang/Bulan	24	207.831.000	24	211.987.620	UMUM
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	Orang	7	119.000.000	7	121.380.000	UMUM
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	2	400.000.000	2	408.000.000	UMUM
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengendalian Penataan Struktur Perangkat Daerah	-	PD	3	746.276.865	3	761.202.402	ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang Menetapkan Analisis Jabatan	3	Anjab	3		3		ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	27	PD	10		10		ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6	PD	8		8		ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	20	PD	23		23		ORGANISASI
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi Struktur Organisasi	3	PD	22	234.904.575	22	239.602.667	ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Analisis Jabatan	3	PD	5		5	0	ORGANISASI
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	27	PD	27	237.249.790	27	241.994.786	ORGANISASI
				Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	27	PD	10		10	0	ORGANISASI
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	PD	50	274.122.500	50	279.604.950	ORGANISASI
				Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	6	PD	8		8	0	ORGANISASI
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	200	7.793.515.605	200	7.949.385.917	PROKOPIM
				Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	230	Lyn	230		230		PROKOPIM
				Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	200		200		PROKOPIM
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	Lap	1	3.457.375.255	1	3.526.522.760	PROKOPIM
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	Lap	1	918.498.430	1	936.868.399	PROKOPIM
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	Lap	1	3.417.641.920	1	3.485.994.758	PROKOPIM
	Meningkatkan Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat		Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	%	96	51.279.649.463	96	52.305.242.453	SEKDA
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan		Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	%	90		90		SEKDA
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	%	100	51.279.649.463	100	52.305.242.453	ASISTEN PEM KESRA
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	65	%	61	617.829.231	61	630.185.815	TAPEM
				Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan	78	%	78		78		TAPEM
				Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100	%	100		100		TAPEM
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	Dok	2	160.384.050	2	163.591.731	TAPEM
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	1	146.411.663	1	149.339.896	TAPEM
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Dok	1	311.033.518	1	317.254.188	TAPEM



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025	Satuan	2026		2027		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	%	95	49.637.643.748	95	50.630.396.623	KESRA
				Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100	%	95		95		KESRA
				Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	100	%	95		95		KESRA
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6	Keg	6	48.864.554.320	6	49.841.845.406	KESRA
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	Keg	2	288.313.489	2	294.079.758	KESRA
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Kebijakan dari Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	2	Keg	544	288.313.489	544	294.079.758	KESRA
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kebijakan yang harmonis	67	%	68	869.735.570	68	887.130.281	HUKUM
				Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	82	%	90		90		HUKUM
				Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	77	%	90		90		HUKUM
				Persentase Publikasi dan penyebaran Peraturan Perundang-undangan	86	%	90		90		HUKUM
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550	Dok	550	423.602.843	550	432.074.899	HUKUM
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	13	Kasus	13	288.899.245	13	294.677.230	HUKUM
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70	Dok	70	157.233.482	70	160.378.152	HUKUM
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	90	%	90	154.440.915	90	157.529.733	TAPEM
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama DalamNegeri	4,5	Dok	25	154.440.915	25	157.529.733	TAPEM
Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Perekonomian dan SDA			Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	%	100	3.369.966.396	100	3.437.365.723	SEKDA
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	%	100	3.369.966.396	100	3.437.365.723	ASISTEN EKBANG
				Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%	100		100		ASISTEN EKBANG
				Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna dan tepat sasaran	100	%	100		100		ASISTEN EKBANG
				Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100	%	100		100		ASISTEN EKBANG
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	%	100	475.361.250	100	484.868.475	EKBANG SDA
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	4	194.547.375	4	198.438.323	EKBANG SDA
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Dok	4	104.574.500	4	106.665.990	EKBANG SDA
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	Dok	1	49.750.000	1	50.745.000	EKBANG SDA
		4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	1	49.750.000	1	50.745.000	EKBANG SDA
		4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	Dok	2	76.739.375	2	78.274.163	EKBANG SDA



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025	Satuan	2026		2027		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	%	100	219.099.000	100	223.480.980	EKBANG SDA
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dok	4	39.800.000	4	40.596.000	EKBANG SDA
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Lap	4	76.615.000	4	78.147.300	EKBANG SDA
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Dok	100	102.684.000	100	104.737.680	EKBANG SDA
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	80	%	80	2.530.280.921	80	2.580.886.539	PBJ
				Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	50	OPD	50		50		PBJ
				Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	20	Plk Ush	20		20		PBJ
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	525	Dok	525	1.456.721.591	525	1.485.856.023	PBJ
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	70	Dok	70	494.051.430	70	503.932.458	PBJ
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	Org	60	579.507.900	60	591.098.058	PBJ
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	%	100	145.225.225	100	148.129.730	EKBANG SDA
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dok	4	49.750.000	4	50.745.000	EKBANG SDA
		4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	Dok	2	49.750.000	2	50.745.000	EKBANG SDA
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	Dok	2	45.725.225	2	46.639.730	EKBANG SDA



BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Sekretariat Daerah menyusun rancangan rencana kerja yang dituangkan dalam wujud dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2026. Dokumen ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2026 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Teknokratik Sekretariat Daerah tahun 2025-2029. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Kepala Sekretariat Daerah beserta segenap Kepala Bagian dan Staf akan melaksanakan program-program kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026. Dalam kaitan itu, diharapkan kepada Bupati selaku Kepala Daerah serta Wakil Bupati Kapuas Hulu dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program yang telah disusun dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran sebagaimana yang dicita-citakan.

Selain itu, perlu adanya sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju serta disiplin dari semua pihak sehingga pada akhirnya nanti terwujud pelaksanaan program-program kegiatan yang sepenuhnya mampu



memberikan manfaat dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026 untuk kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu yang adil dan merata.

Putussibau, 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI



LAMPIRAN 1 Daftar Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah

No	Dokumen	Link Soft Copy (PDF)	Hard Copy	Ket.
1	Matrik RATL hasil Evaluasi SAKIP	Link	-	
2	Pohon Kinerja	Link	-	
	Cascading Kinerja	Link	-	
	Crosscutting	Link	-	
3	SOP Pengukuran Kinerja	Link	-	
	SOP Pengumpulan Data Kinerja		-	
4	Renstra 2025-2029	Link	-	
5	Renja 2024	Link	-	
6	Renja 2025	Link		
7	Perjanjian Kinerja 2025	Link	-	
8	SKP 2025		-	
9	Rencana Aksi		-	
	Rencana Aksi Perubahan		-	
10	RKA 2025	Link	-	
	DPA 2025	Link	-	
11	DPPA Penyempurnaan 2025	Link	-	
	DPPA 2025	Link	-	
12	IKU	Link	-	
	IKI		-	
14	Laporan Kinerja 2024	Link	-	
16	LHE AKIP Setda 2023 oleh Inspektorat	Link	-	
17	Penilaian Mandiri AKIP Setda Kab. Kapuas Hulu 2024	Link	-	